

Analisis kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan Akad Tijarah

Ade Suryani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20293282&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yang diangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khusus terhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.

Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapan peraturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikan dua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisi perbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknya melakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perbankan syariah.

<hr>

Abstract

With the background of the above problems, the main issues raised in this thesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions with tijara contract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions, how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the tax treatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared using many methods.The method used is book study, field studies and Interviews.

Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.

To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamic banking transactions in other countries, the government should be able to provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamic banking and tax laws, the government must pay attention to two factors. The first factor, the government should involveactors that had to do with Islamic banking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian Ulema

Council, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government that represented the DGT should be to harmonize the regulations set forth in connection with Islamic banking.